

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek

1. Profil Umum BPKAD

Sebelum terbentuknya Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah dulu itu semua yang terkait dengan keuangan daerah itu masih dipegang oleh yang namanya Kabag Keuangan Daerah dan semua masih menyatu di Kantor Pemda setelah adanya pemecahan-pemecahan terbentuklah yang namanya Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendapatan, setelah adanya otonomi daerah yang baru, maka DPPKAD berubah menjadi Badan pengelolaan keuangan aset daerah yang mana, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok pada pasal di atas, Dinas Pendapatan, Pengelola :

Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
- d) Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- e) Pembinaan kelompok jabatan fungsional
- f) Pelaksanaan ketatausahaan

- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan dimana semakin meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan terus menerus memanfaatkan peluang dan inovasi serta mempersiapkan diri agar mampu mengupayakan perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat yang dituangkan dalam visi dan misi.

Visi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan akan diarahkan kemana dan apa yang akan dicapai dalam mendukung visi pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan .

Adapun Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut :

“ Terwujudnya pempapatan daerah yang signifikan untuk menunjang pembangunan, serta pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tertib dan profesional”.

Misi

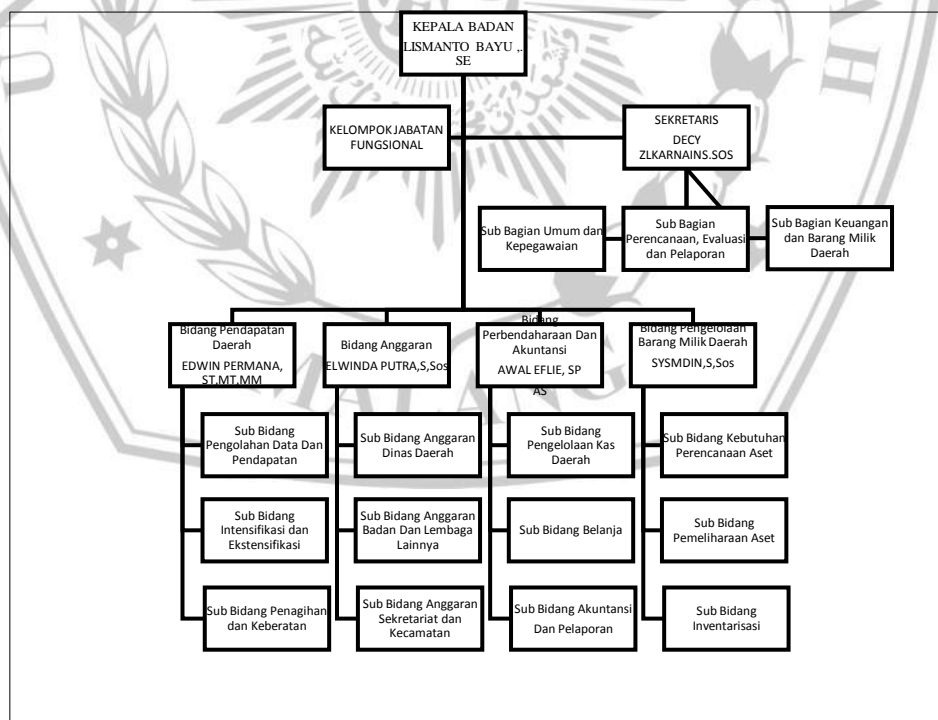
Dalam Rangka mencapai visi yang telah ditetapkan demi terwujudnya pendapatandaerah yang signifikan untuk menunjang pembangunan serta tercapainya pengelolaan aset daerah yang profesional, maka dirumuskan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan :

- a) Menggali dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah
- b) Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

- c) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran untuk membayar pajak restribusi
- d) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- e) Melakukan pembinaan kepada pengelolaan keuangan pada OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
- f) Melakukan penyusunan anggaran yang berbasis kinerja serta tepat waktu
- g) Melakukan inventaris terhadap barang milik daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mencapai data aset yang akurat dan handal
- h) Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan barang di masing-masing OPD

C. Struktur Organisasi atau Kepengurusan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan



Gambar : 4.1 Struktur Organisasi

Sumber: BPKAD KAB Bengkulu Selatan

D. Tugas dan Fungsi

1) Sekretariat

Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Badan dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Badan untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan
- b) Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan
- c) Pengkoordinasian penyusunan rancangan produk hukum
- d) Penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan
- e) Pengelolaan keuangan Badan
- f) Pengelolaan situs web Badan dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh :

1. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan.

2. SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Badan

3. SUB BAGIAN KEUANGAN

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Badan.

2. Bidang Pendapatan Daerah

- a) Membantu kepala dinas dibidang tugasnya.
- b) Mengkoordinasikan pengumpulan bahan rencana strategis dibidang pendapatan daerah.
- c) Mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi mengenai semua aspek yang berhubungan dengan pendapatan daerah.
- d) Menyusun kebijakan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, penetapan dan penagihan pajak dan retribusi daerah.
- f) Melaksanakan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah).
- g) Mengkoordinasikan penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

1. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan analisa kebijakan anggaran daerah
- b) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran PPKD dan pembiayaan
- c) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran pendapatan daerah
- d) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran belanja daerah
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Anggaran
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan perbendaharaan. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a) Pengelolaan kas daerah
- b) Pengelolaan belanja tidak langsung belanja pegawai
- c) Pengelolaan anggaran PPKD
- d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Perbendaharaan dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan barang daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan bahan perumusan kebijakan analisis perencanaan barang milik daerah
- b) Penyusunan bahan perumusan kebijakan penatausahaan barang milik daerah
- c) Penyusunan bahan perumusan kebijakan pengamanan dan pemanfaatan barang milik daerah
- d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Aset Daerah
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

E. Penyajian Data

1. Karakteristik Narasumber

Berdasarkan dari penelitian, Narasumber atau Respondens yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yaitu :

Tabel 4.1 Karakteristik Narasumber

No	Nama	Jabatan	Peran dalam wawancara	Pengetahuan tentang pengelolaan keuangan aset daerah
1.	Lismanto Bayu, SE	Kepala Badan	Kepala Badan	Ya

2.	Decky Zulkrnain,S.Sos	Sekretariat	Sekretariat	Ya
3.	Elwinda Putra.,S.Sos	Kabid Anggaran	Kabid Anggaran	Ya
4.	Awal Elfie., SP	Kabid Perbendaharaan	Kabid Perbendaharaan	Ya
5.	Novi Fatriawan., SE	Sub . Bidang Perencanaan Aset	Sub . Bidang Perencanaan Aset	Ya
6.	Betharia sri .R SE,.M.si	Sub.Bidang pengelolaan kas daerah	Sub.Bidang pengelolaan kas daerah	Ya
7	Yulian Hidayat ,SE	Sub Bidang Belanja	Sub Bidang Belanja	Ya

Sumber Data : Diolah

Tabel diatas menunjukan bahwa narasumber atau responden yang teribat dalam peelitian yang merupakan bersumber dari pemertintah dan ke 7 orang pada Badan penelolaan keuangan aset daerah Kab Bengkulu Selatan.

F. Analisis Data

2. Penerapan Prinsip Good Government Governance

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan ke 7 narasumber denga dibidang masing-masing , berikut ini merupakan analisis dari penerapan prinsip-prinsip good government governance , yaitu:

1. Prinsip Partisipasi Masyarakat

Peran masyarakat didalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting yang mana untuk memajukan kesejahteraan masyarakat daerah yaitu anggaran suatu daerah , untuk itu masyarakat dituntut dalam berpartisipasi pengelolaan keuangan aset daerah dari mulai tahap perencanaan , pelaksanaan, pertanggungjawaban hingga pengawasan APBD daerah itu sendiri. Berikut merupakan hasil dari wawancara dengan Kepala Badan Lismanto Bayu, SE :

“ Menurutnya regulasi tidak mengatur untuk menyajikan laporan tentang pengelolaan keuangan secara langsung kepada masyarakat tetapi hanya dilakukan melalui peraturan Negara tentang pengelolaan keuangan daerah”.

(Hasil wawancara dengan Lismanto Bayu, SE, pada tanggal 14 April 2020)

Dari hasil wawancara tersebut, menyampaikan bahwasanya masyarakat tidak berpartisipasi langsung terhadap laporan keuangan daerah , dikarenakan laporan keuangan yaitu bersifat rahasia dan itu hanya khusus pemerintah daerah saja yang mengetahuinya , Menurut Lismanto Bayu masyarakat belum berpartisipasi dalam mengetahui bagaimana laporan keuangan daerah pada Badan pengelolaan keuangan aset dan daerah.

Pendapat ini juga didukung oleh Bagian Pendapatan , Bendaharaan , Aset daerah sehingga dapat disimpulkan menurut pemerintah daerah , masyarakat belum dapat berperan aktif terhadap laporan keuangan daerah dikarenakan regulasi tidak adanya mengatur untuk menyajikan secara langsung pada masyarakat.

“ Pengawasan keuangan secara nyata yang dilakukan masyarakat masih belum , tapi biasanya ada yang namanya reses untuk anggota DPRD reses itu seperti dimana DPRD melakukan kegiatannya diluar untuk melakukan kunjungan kerja diluar Gedung DPRDnah disitulah tugas mereka untuk mendengarkan usulan atau masukan dari masyarakat yang nantinya akan ditindak lanjuti apa yang masyarakat sampaikan prilaku DPRD sangat aktif dalam mengawasi pengelolaan keuangan aset daerah. Kalau untuk masyarakat awam biasanya mereka tidak peduli”.

(Hasil wawancara dengan Bapak Elwinda Putra kabid Anggaran pada tanggal 14 april 2020)



Gambar : 4.2 Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan saat melakukan reses

Dari kutipan wawancara tersebut Elwinda Putra, bahwa DPRD merupakan jembatan aspirasi masyarakat jadi menyampaikan bahwa masyarakat dalam mengawasi secara langsung masih belum sehingga orang-orang yang terlibat dalam pengawasan hanya yang mempunyai kewenangan atau yang terlibat dalam perencanaan APBD daerah.

Dilihat dari pendapat tersebut, bisa disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat masih kurang dalam berperan aktif dan belum dapat menjalankan fungsi pengawasan dalam mengawasi pengelolaan keuangan aset daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

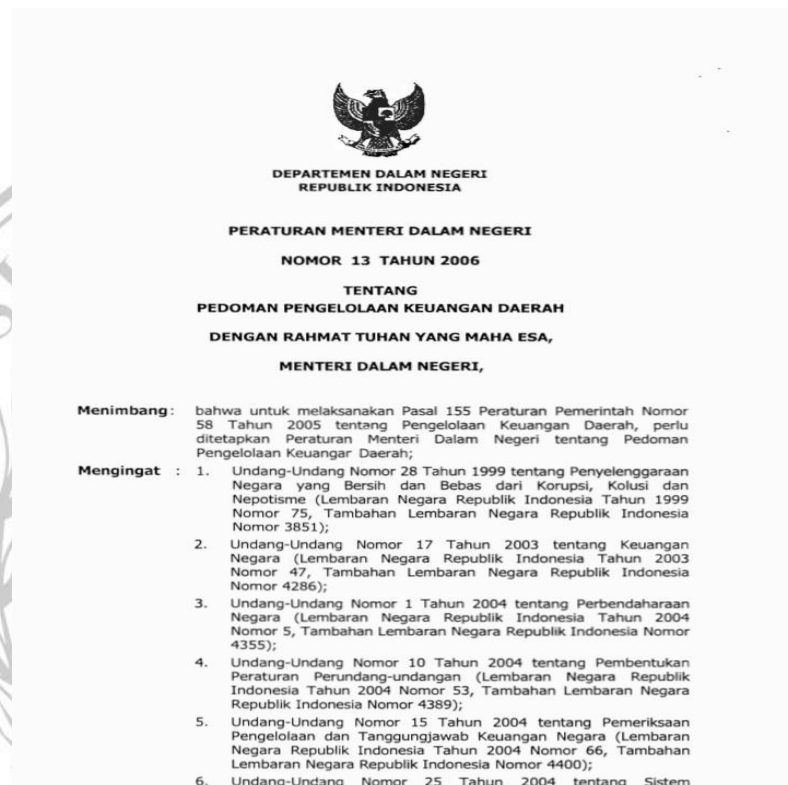
2. Prinsip Rule of Law

Pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan menjalankan sistem pemerintahan yang sesuai dengan aturan atau regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat Yulian Hidayat. SE Kasubbid Belanja berpendapat :

“Semua prosedur terkait dengan pengelolaan keuangan Daerah sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya seperti permendagri No 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, tapi dimulainya di tahun 2007 atau baru ditepkannya prinsip good government governance di Badan

pengelolaan keuangan aset daerah Kabupaten Bengkulu Selatan khususnya prinsip Rule of Law semua prosedur yang kami lakukan sudah sesuai dengan perundang-undangan atau peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah.

(Hasil wawancara dengan Yulian Hidayat, SE pada tanggal 14 april 2020)



Gambar : 4.3 PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006

Pendapat ini juga didukung dari Elwinda Putra, S.Sos dan Edwin Permana selaku kabid Pendapatan Aset kantor Badan pengelolaan keuangan aset daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang menyatakan bahwasanya semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah sesuai dengan peraturan dan regulasi yang sudah berlaku di pemerintah pusat Indonesia.

Menurut Elwinda Putra, S.Sos BPKAD Kab Bengkulu Selatan :

“Sudah lama , karena menurut saya begitu banyak regulasi dan SOP yang diberikan pemerintah , jadi sebenarnya permendagri yang ditetapkan di Badan pengelolaan keuangan aset daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 , jadi masih belum bisa dibilang sesuai tapi diusahakan disesuaikan , Tapi Pemerintah daerah berupaya untuk mengikuti atau menerapkan peraturan yang berlaku dari pemerintah pusat dengan baik”.

(Hasil wawancara dengan Elwinda Putra, pada tanggal 14 April 2020)

Dari beberapa pendapat tersebut , dapat dilihat bahwa pemerintah daerah terutama di Badan pengelolaan keuangan aset daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sudah menjalankan system pemerintahanya sesuai dengan aturan yang berlaku , namun belum secara keseluruhan , dikarenakan dari beberapa bidang masih mengusahakan kesesuaian peraturan undang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

3. Prinsip Transparansi

Setelah APBD daerah disahkan oleh pemerintah maka ,pemerintah bertanggungjawab untuk menyampaika kepada masyarakat tetapi yang terkait dengan laporan keuanga daerah , laporan relisasi anggaran. Hasil wawancara dengan Awal Eflie , SP Kabid perbendaharaan BPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan :

“ Laporan pertanggungjawaban , laporan keuangan daerah tidak disampaikan langsung kepada masyarakat, tetapi laporan keuangan tersebut disampaikan ke pada Bupati lalu DPRD lah yang tuganya mengesahkan anggaran yang diusulkan oleh kepala daerah , karena DPRD disini sebagai control Bupati dalam Anggaran”.

(Hasil wawancara Awal Eflie , SP pada tanggal 14 April 2020)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dibuktikan bahwasanya Badan pengelolaan keuangan aset daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tidak menyampaikan Laporan pertanggungjawaban, laporan keuangan daerah, laporan realisasi anggaran kepada masyarakat secara langsung karena laporan keuangan bersifat rahasia , akan tetapi laporan itu disampaikan ke DPRD karena mereka adalah sebagai wakil rakyat.

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah)

No. Urut	Uraian	Saluran	Anggaran 2018	Realisasi 2018 (Audited)	(%)	Realisasi 2017 (Audited)
4	PENDAPATAN - LRA	4.1.1	931.635.877.906,35	914.271.238.091,44	98,14	943.382.824.746,96
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	4.1.1.1	81.896.328.868,69	87.243.733.479,88	106,52	8.624.131.744,58
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA		7.766.270.000,00	9.691.800.487,80	124,79	2.101.120.470,50
4.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA		2.293.794.800,00	1.776.127.104,50	77,43	1.226.664.331,57
4.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA		2.570.493.871,69	2.570.493.871,69	100,00	44.531.598.581,24
4.1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA		69.165.810.097,00	51.205.312.615,89	74,03	883.594.577.628,61
4.1.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	4.1.1.2	849.738.748.137,66	847.027.504.921,56	99,91	745.167.788.456,00
4.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemindahan Pusat - LRA		725.543.761.680,00	719.210.826.106,69	99,13	9.501.605.528,00
4.1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA		5.112.837.000,00	5.100.784.069,00	99,76	1.535.490.348,00
4.1.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA		5.146.290.000,00	5.100.784.069,00	99,10	524.227.933.000,00
4.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA		554.227.555.000,00	554.135.555.062,00	99,98	98.546.224.000,00
4.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA		66.173.000.000,00	63.950.822.660,00	96,78	79.354.953.560,00
4.1.2.1.5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Pajak - LRA		90.871.075.000,00	87.779.422.090,00	96,60	110.746.785.400,00
4.1.2.2	Pendapatan Transfer Pemindahan Pusat - Lainnya - LRA		97.393.929.000,00	97.388.065.000,00	99,99	112.740.785.400,00
4.1.2.2.1	Dana Pemecatan - LRA		97.393.929.000,00	97.388.065.000,00	99,99	27.686.003.772,91
4.1.2.2.2	Pendapatan Transfer Pemindahan Daerah Lainnya - LRA		26.801.058.137,66	30.418.613.413,56	113,50	27.686.003.772,91
4.1.2.2.3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA		26.801.058.137,66	30.418.613.413,56	113,50	1.184.334.000,00
4.1.2.2.4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Lainnya - LRA		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	4.1.1.3	0,00	0,00	0,00	1.184.334.000,00
4.1.3.1	Pendapatan Lain - LRA		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2	Pendapatan Lain - Lainnya - LRA		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.4	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA	4.1.2	784.346.376.116,53	732.620.135.396,90	93,41	747.598.746.403,73
5.1	BELANJA OPERASI	4.1.2.1	681.627.150.341,53	637.076.537.826,90	93,46	619.506.415.119,26
5.1.1	Belanja Pegawai	4.1.2.1.1	407.779.480.080,72	393.700.510.562,00	96,55	392.383.409.319,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.1.2.1.2	259.566.270.260,81	230.768.241.794,50	88,95	211.876.755.800,20
5.1.3	Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Modal	4.1.2.1.3	5.186.400.000,00	7.615.285.500,00	146,85	7.113.200.000,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.1.2.1.4	5.095.000.000,00	4.992.500.000,00	97,99	7.856.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	4.1.2.2	102.219.225.775,00	95.543.597.570,00	93,47	128.090.331.284,53
5.2.1	Belanja Tanah	4.1.2.2.1	788.593.000,00	643.628.360,00	81,62	1.779.020.000,00
5.2.2	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	4.1.2.2.2	18.875.012.525,00	14.410.378.410,00	76,39	29.052.240.976,53
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.1.2.2.3	26.481.728.000,00	25.473.789.000,00	96,19	27.336.253.048,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jembatan dan Jaringan	4.1.2.2.4	54.829.801.250,00	53.863.187.800,00	98,24	68.018.502.410,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.1.2.2.5	1.244.111.000,00	1.232.614.000,00	99,08	1.904.314.000,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	4.1.2.3	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	4.1.2.3.1	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6	TRANSFER	4.1.3	157.133.880.900,00	157.133.880.900,00	100,00	170.813.398.800,00
6.1	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	4.1.3.1	157.133.880.900,00	157.133.880.900,00	100,00	170.813.398.800,00
6.1.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		155.981.880.900,00	155.981.880.900,00	100,00	169.694.918.700,00
6.1.2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		1.152.000.000,00	1.152.000.000,00	100,00	1.118.480.100,00
6.2	SURPLUS / (DEFISIT)		(9.845.180.010,18)	24.517.221.704,54	-249,03	24.850.679.563,17
7	PEMBAYARAN	4.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4.1.4.1	28.474.095.010,18	28.938.763.007,18	101,63	3.623.415.447,01
7.1.1	Penerimaan S/LPA		28.474.095.010,18	28.938.763.007,18	101,63	3.623.415.447,01
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.1.4.2	18.628.915.000,00	18.628.914.565,38	0,00	0,00
7.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
7.2.2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		13.628.915.000,00	13.628.914.565,38	0,00	0,00
7.3	PEMBAYARAN NETTO		9.845.180.010,18	10.309.848.441,80	104,72	3.623.415.447,01
7.3.1	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		0,00	34.827.070.146,34	0,00	28.474.095.010,18

Uraian Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini

Menurut

Badan pengelolaan keuangan aset daerah Kabupaten Bengkulu Selatan , Laporan keuangan tersebut hanya dilaporkan kepada Kepala DPRD , BPK , Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan.

Gambar : 4.4 Bukti arsip Laporan Realisasi Anggaran yang di sampaikan ke BUPATI

Sumber : BPKAD Kab Bengkulu Selatan

Menurut hasil wawancara dari Betharia Sri.R Kasubbid pengelolaan Kas Daerah:

“ Laporan keuangan pada Badan pengelolaan keuangan aset daerah Kabupaten Bengkulu Selatan hanya disampaikan kepada bawahan, karyawan , kalo kepada masyarakat ada hal-hal yang memang kita rahasiakan , memang tidak dipublikasikan kepada masyarakat karena menyangkut dengan laporan keuangan harus dirahaskan khusus pemerintah daerah aja “

(Hasil wawancara dengan Betharia Sri .R pada tanggal 14 April 2020)

Hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa masyarakat tidak dapat mengetahui secara langsung tentang laporan keuangan yang telah dikelola oleh Badan pengelolaan keuangan aset daerah Kabupaten Bengkulu Selatan karena ada hal-hal yang harus dirahasiakan dan hanya khusus pemerintah yang mengetahuinya.

Dari analisis tersebut , untuk prinsip transparansi sudah dijalankan oleh pemerintah daerah khususnya pada Badan pengelolaan keuangan aset daerah Kabupaten Bengkulu Selatan belum sepenuhnya , dikarenakan pemerintah tidak menyampaikan informasi terkait laporan reaslisasi kepada pihak masyarakat secara langsung atau terbuka karena masih adanya hal yang harus dirahasiakan apalagi berhubungan dengan laporan keuangan.

4. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban public yang berarti yang mana ada proses penganggaran baik itu dari perencanaan , penyusunanpelaksanaan dan harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat.Selain tanggungjawab kepada pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah juga memiliki tanggungjawab kepada masyarakat daerah, bentuk tanggungjawab yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat berupa pembinaan

pengelolaan keuangan daerah. Ini merupakan hasil wawancara dengan masyarakat :

“Mengenai keuangan daerah , yang sudah-sudah ini belum adanya dilakukan sosialisasi dari pemerintah daerah kemsyarakat.

(Hasil wawancara dengan Surya lutfi sebagai Masyarakat Awam pada tanggal 19 April 2020)

Hasil wawancara bahwa tidak adanya sosialisasi pemeritah daerah khususnya Badan pengelolaan keuangan aset daerah Bengkulu Selatan tidak mensosialisasikan mengenai keuangan daerah. Berikut ini juga merupakan wawancara dengan Masyarakat:

“Karena masyarakat banyak yang tidak ingin mengetahui mengenai pengelolaan keuangan daerah , jadi masyarakat tidak bias menjalankan fungsi pengawasan. Jadi fungsi pengawasan dari masyarakat daerah Bengkulu Selatan belum dapat diterapkan tetapi terkait dengan pengawasan hanya dilakukan pihak-pihak karena masyarakat biasa daerah ini banyak tidak peduli dan cuek mereka sama sekali tidak tahu peran mereka dalam pengawasan”

(Hasil wawancara dengan.....pada April 2020)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah daerah memang tidak mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan daerah , sehingga masyarakat merasa tidak perlu terlibat dalam pemerintahan daerah. Peneliti menemukan bahwa tidak adanya sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat.

5. Prinsip Efektif dan Efisien

Pada Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan lebih tepatnya pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah setelah adanya perencanaan yang telah disusun dalam pelaksanaannya pemerintah daerah harus merencanakan seefektif dan seefisien mungkin baik itu aset yang akan dibutuhkan dimasa sekarang atau mendatang. Berikut ini merupakan hasil

wawancara dengan Novi Fatriawan, SE sub. Bidang kebutuhan perencanaan Aset:

“Menurut saya pemerintah daerah di kabupaten Bengkulu Selatan , tepatnya kantor BPKAD sudah menetapkan adanya sebuah standar yaitu standar kekayaan minimum yang dimiliki daerah untuk bisa nantinya dapat memenuhi pelayanan yang dibutuhkan masyarakat tepatnya di Daerah Bengkulu Selatan ini , dari pelaksanaan tersebut akan ada yg namanya pelaksanaan “.

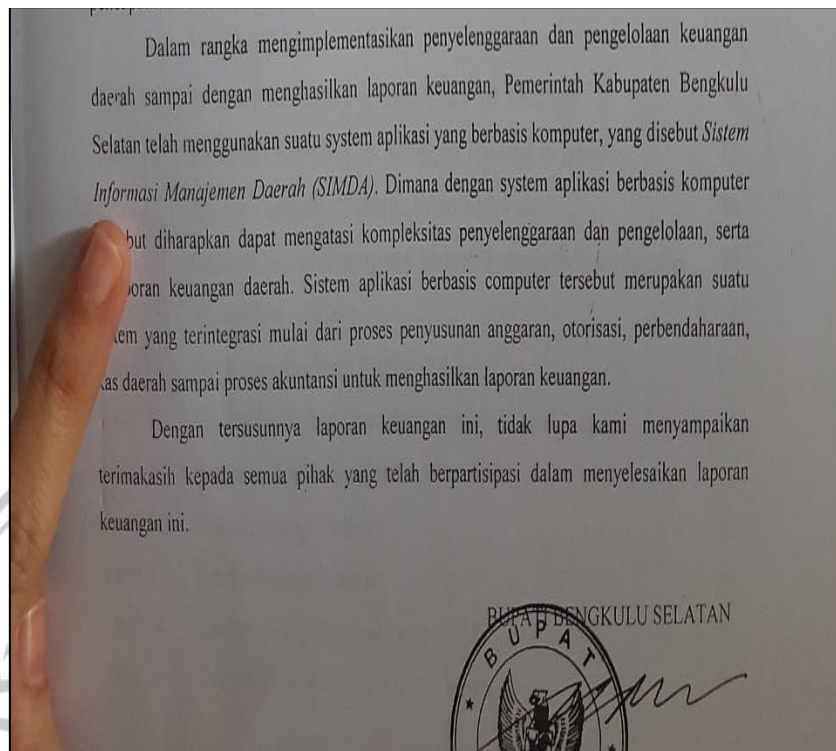
(Hasil wawancara Novi Fatriawan, SE pada tanggal 15 April 2020)

Hasil wawancara diatas mengartikan bahwasanya kantor Badan pengelolaan keuangan aset daerah telah atau sudah melaksanakan tugasnya sesuai ketetapan yang ada, setelah pemerintah daerah menyusun dan memiliki perencanaan maka pemerintah daerah bisa mengoptimalkan dengan baik dalam mengelola aset daerah yang dimiliki dan peran masyarakat setempat dan DPRD sangat penting terhadap pemanfaatan aset daerah tersebut.

(Menurut Kasubbid pengelolaan keuangan kas dan belanja daerah BPKAD Bengkulu Selatan pada 15 April 2020)

“ Menurut kita sejauh ini untuk pengeolaan laporan keuangan daerah sudah efektif dan efesien.dan Menurut bapak Yulian Hidayat SE selaku kasubbid belanja daerah mengatakan, kalo sebelum pmendagri Nomor 13 tahun 2006, dalam kegiatan pelaporan keuangan dia itu kan masih manual cara pelaporannya tetapi setelah adanya pmendagri Nomor 13 yan ada namanya SIMDA ini maka dilaporannya itu sekarang udah ada Neraca, La sudah ada dan lebih praktis , kalo dulu kan masih manual dan harus merekap semuanya yang jelas dari pelaporan kita lebih dimudahkan lebih cepat dan tepat dan lebih efesien karena sekarang kita menggunakan sistem Simda dan juga baik dari sisi

laporan keuangan atau aset daerah Bengkulu Selatan selalu tepat waktu pada saat dilaporkan ke pihak BPK”.



Gambar:4.5 Arsip dokumen mengenai kalau BPKAD menggunakan SIMDA

Sumber : BPKAD Kab Bengkulu Selatan

Dari kedua hasil atau bukti yang diatas , dapat dikatakan bahwa prinsip efektif dan efisien telah sangat diterapkan dengan sebaik-baiknya , dari sisi aset daerah dan pengelolaan pelaporan keuangan daerah di Badan pengelola keuangan aset daerah Bengkulu selatan kepada pemerintah daerah tersebut.

6. Prinsip Responsibility

Di dalam pengelolaan keuangan daerah yang mana sudah diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 menyatakan bahwa Badan pengelolaan keuangan aset daerah Bengkulu Selatan mempunyai tanggungjawab atas melaporkan semua bentuk laporan keuangan daerah. Dalam rangka merealisasikan anggaran APBD daerah yang sudah

direncanakan. Berikut hasil wawancara dengan Perbendaharaan BPKAD Bengkulu Selatan :

“Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang setiap tahunnya akan diaudit oleh BPK (Badan Pengawas Keuangan) Wilayah Bengkulu , seperti halnya pihak inspektorat ini berkala melakukan untuk pemeriksaan selama 3 bulan atau semesteran terhadap OPD-OPD yang ada , setelah itu hasil dari pemeriksaan Inspektorat biasanya mereka itu namanya pengawasan bukan pemeriksaan nah dari pengawasan yang mereka lakukan nanti ada hasil yaitu LHP Inspektorat itu pihak BPKAD menidaklanjuti.

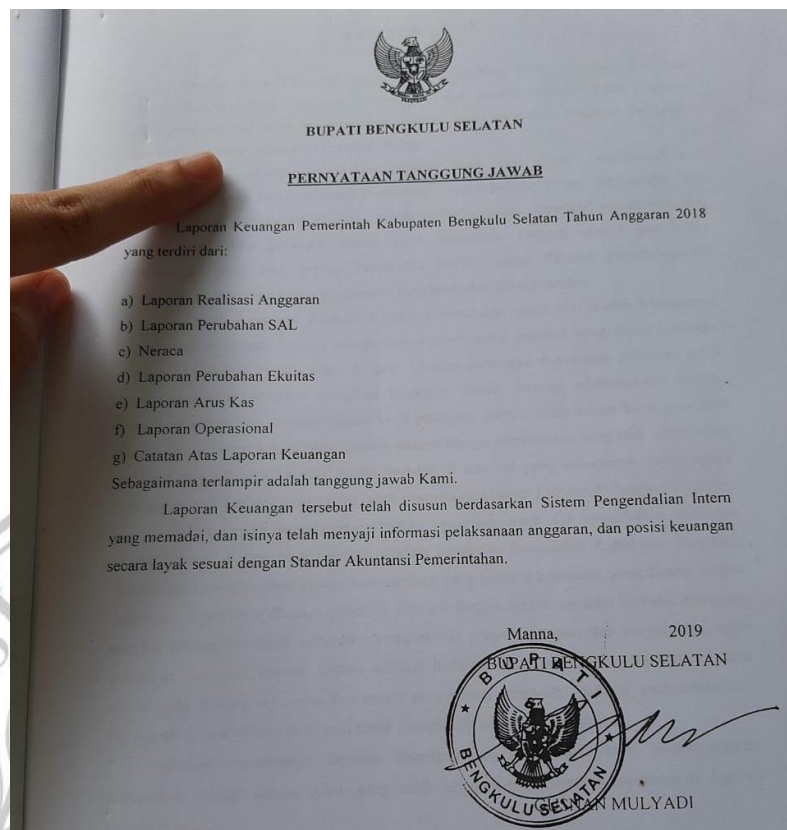
(Hasil wawancara dengan Betharia Sri Rahayu pada tanggal 14 April 2020)

Hasil dari wawancara diatas diperoleh bahwa Badan pengelolaan keuangan aset daerah selalu tepat waktu dalam menyampaikan laporan realisasi dan pertanggungjawaban kepada BPK (Badan Pengawas Keuangan) bias 3 bulan atau semesteran.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan Anggaran BKAD Bengkulu Selatan :

“ Ya sebelum mereka menyampaikan laporan keuangan ke pada pihak BPK (Badan Pengawas Keuangan) mereka ada review terdahulu jadi disitulah tahapan mereka untuk memastikan bahwa laporan keuangan ini secara seluruh sudah disusun dengan baik dan benar seperti itu. Nah untuk terkait penyusunan anggaran yang biasanya sesuai dengan APBD, melakukan penata usaha , berupa laporan keuangan baik periodik , triwulan, akhir tahun atau Laporan Pemerintah dalam 1 tahun agar menghasilkan pelaporan keuangan sesuai perundang-undangan.

(Hasil wawancara dengan Elwinda Putra pada 14 April 2020)



Gambar : 4.6 Dokumen yang menunjukkan pertanggungjawaban

Sumber : BPKAD Kab Bengkulu Selatan

Dari kedua hasil wawancara yang didapatkan, bahwa disimpulkan di Badan pengelolaan keuangan aset daerah melaksanakan penerapan prinsip Responsibility atau tanggungjawab menyampaikan dan melaporkan laporan keuangan yang telah disampaikan sebelumnya kepada Bupati, maka baru disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan.

7. Prinsip Keadilan

Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah pada Badan pengelolaan keuangan aset dan daerah dalam APBD, disusun melalui yang namanya musyawarah, musyawarah atau rapat ini yang akan dihadiri yaitu oleh PPTK, Staff dan Kabid diharapkan bahwa APBD yang direnakan biasa merata ke masyarakat pemerintah daerah Bengkulu Selatan. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Betharia Sri Rahayu.,SE.,Msi

“Terkait dengan APBD yang dibentuk atau yang sudah direncanakan akan dilaksanakan semerata mungkin khususnya untuk masyarakat pemerintah daerah , selain itu untuk pembagian fungsinya di kantor ini kita kan adanya yang namanya apalagi bidang itu namanya team jadi kita sebaik mungkin antara PPTK, Staf dan Kabid itu udah pada porsi masing-masing jadi adil itu belum tentu sama , tapi sesuai dengan porsi masing-masing tapi tetap ada bagian-bagiannya karena sudah ada ketentuan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) sudah ada runutan dan jalur-jalurnya”

(Hasil wawancara dengan Betharia Sri Rahayu.,SE.,Msi pada tanggal 15 April 2020)

Hasil wawancara yang didapatkan , bisa disimpulkan terkait dengan apa yang telah direncanakan atau disusun oleh pemerintah daerah yaitu terkait dengan APBD terkhusus untuk masyarakat daerah Kabupaten Bengkulu Selatan akan dilaksanakan semerata mungkin.

8. Prinsip Peduli Kepada Masyarakat

Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Bengkulu Selatan , dimana Pemerintah daerah atau Lembaga pemerintahan harus dapat melayani semua pihak yang berkepentingan , terutama kepada masyarakat , Dalam merencanakan sebuah pembangunan daerah, dan mengetahui kebutuhan apa saja yang masyarakat perlukan dan fasilitas yang masyarakat butuhkan yang nantinya akan di pergunakan. Hasil wawancara dengan Betharia Sri Rahayu

“ Khususnya di bagian perbendaharaan Badan Keuangan Aset Daerah Bengkulu Selatan (BPKAD) sudah dijalankan dengan baik dan semestisnya kan itu terkait dengan cara kita melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang datang seperti Pelayanan prima sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya terhadap masyarakat masyarakat yang mempunyai urusan yang datang ke BPKAD khususnya”

(Hasil wawancara dengan Bethria Sri Rahayu pada 15 April 2020)

Hasil wawancara yang didapatkan infomasinya, bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Bengkulu Selatan (BPKAD) sudah adanya penerapan pada prinsip peduli kepada masyarakat , seperti hal yang disampaikan kepada salah satu staf perbendaharaan. kalau di Kantor BPKAD ini sudah menjalankan dengan baik terkait dengan pelayanan publik, yaitu melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang datang , seperti pelayanan prima adalah melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan sehingga menimbulkan rasa kepuasan dengan tujuan adanya pelayanan prima yang sudah diterapkan untuk memberikan pelayanan sehingga bias memenuhi dan memuaskan para masyarakat yang mempunyai urusan yang datang ke Badan Pengelolaan keuangan Aset daerah Bengkulu Selatan (BPKAD).

Dari pendapat tersebut , disimpulkan bahwa prinsip peduli kepada masyarakat telah dijalankan dengan sebaik-baiknya .

9. Prinsip Berorintasi Kepada Konsesus

Didalam prinsip tersebut , masyarakat yang mana dituntut untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah didalam mengambil keputusan , kantor Badan pengelolaan keuangan aset daerah masyarakat berama pemerintah daerah akan melakukan kegiatan dalam rangka APBD , Laporan Keuangan.

Beikut hasil wawancara dengan Lismanto Bayu pada 15 April 2020

“ Untuk BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah tidak berhubungan langsung atau bekerjasama dengan masyarakat dalam mengambil keputusan apapun , karena disini menyangkut informasi laporan keuangan daerah , ya menurut kami masyarakat tidak perlu untuk mengetahuinya , lagian kebanyakan masyarakat tidak mau tahu,karena memang tidak ingin mengetahuinya, tapi untuk terkait informasi laporan keuangan hanya kemanajemen dari kantor BPKAD saja.

(Hasil wawancara dengan Lismanto Bayu pada 17 April 2020)

Dari Hasil wawancara tersebut , menurut Lismanto Bayu Badan pengelola keuangan aset daerah tidak berhubungan langsung atau sebelumnya melakukan bermusyawarah dalam mengambil keputusan , karena bagi kantor BPKAD masyarakat tidak adanya kepentingan. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip kepada consensus belum sepenuhnya dijalankan dengan baik , dikarenakan masih ada hal-hal yang masyarakat untuk mengetahui khususnya di Badan pengelolaan keuangan aset daerah berhubungan dengan laporan keuangan dan itu harus dirahasiakan.

Berdasarkan hasil analisis dari penerapan prinsip good government governance pada point sebelumnya , Table perbandingan antara praktik dan teori,yaitu :

3. Perbandingan antara Praktik dan Teori Prinsip Good Government Governance

Tabel : 4.2 Perbandingan antara Praktik dan Teori Prinsip Good Government Governance

No	Prinsip Good Government Governance	Sudah/Belum Sepenuhnya/Tidak Sepenuhnya	Alasan
1	Partisipasi Masyarakat	Belum Sepenuhnya	<p>1. Masyarakat memang tidak terlibat langsung dalam pengeolaan keuangan daerah tetapi mereka dapat menyampaikan apa yang mereka inginkan atau aspirasi ke pada anggota DPRD.</p> <p>2. Karena berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah , maka ada hal-hal yang perlu dirahasiakan dan tidak di publis ke masyarakat.</p>
2	Rule Of Law	Sudah	<p>1. Pengelolaan Keuangan daerah sudah berpedoman semua sesuai dengan perundang-undangan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah</p>

			pusat dalam pengelolaan keuangan daerah
3	Transparansi	Tidak Sepenuhnya	1. Pemerintah daerah khususnya BPKAD Bengkulu Selatan tidak menyampaikan laporan keuangan daerah pada masyarakat karena tidak adanya situs resmi
5	Efektif dan Efisien	Sudah	1. Dalam mengoptimalkan aset daerah yang dimiliki, baik aset yang akan dibutuhkan dimasa sekarang atau mendatang dengan efisien. 2. Menggunakan SIMDA laporan keuangannya lebih efisien.
6	Responsibilitas	Sudah	1. Dalam menyampaikan laporan realisasi dan pertanggungjawaban kepada BPK disampaikan tepat waktu 2. Mereview terdahulu untuk memastikan bahwa laporan keuangan ini secara seluruh sudah disusun dengan baik dan benar.
7	Keadilan	Sudah	1. Dalam penyusunan APBD , disusun melalui yang namanya musyawarah , musyawarah atau rapat ini yang akan dihadiri yaitu oleh PPTK , Staff dan Kabid.
8	Peduli Kepada Masyarakat	Sudah	1. Pelayanan Prima yang diterapkan di BPKAD 2. Masyarakat mendapatkan pelayanan public dengan baik
9	Berorintasi kepada Konsesus	Tidak Sepenuhnya	1. Keputusan yang diambil pemerintah tidak adanya campur tangan dari masyarakat karena menyangkut informasi laporan keuangan daerah dan Ini dirahasiakan.

Berdasarkan hasil table perbandingan antara teori dan praktik diatas , bisa disimpulkan dari ke 9 (Sembilan) prinsip good government governance ada 3 (Prinsip Akuntabilitas , Transparansi dan Berorinasi kepada konsesus) prinsip ini prinsip yang tidak sepeuhnya diterapkan dan Prinsip partisipasi masyarakat belum sepenuhnya di BPKAD.

4. Penarikan Kesimpulan perbandingan antara teori dan pratik

Berdasarkan analisis dan pembahasan teori , penerapan prinsip Good Government Governance , begitu penting bagi pemerintah daerah. Kesimpulan dari penerapan prinsip Good Government Governance sebagai berikut :

1. Untuk prinsip partisipasi masyarakat , masyarakat daerah Kabupaten Bengkulu Selatan masih kurang berpartisipasi dalam melaksanakan pengelolaan atau pengawasan tentang keuangan daerah , dikarenakan bahwasanya masyarakat tidak berpartisipasi langsung terhadap laporan keuangan daerah tetapi melalui DPRD lah jika masyarakat ingin mengusulkan atau menginginkan apa yang mereka inginkan karena disini DPRD merupakan jembatan aspirasi masyarakat, dikarenakan laporan keuangan yaitu bersifat rahasia dan itu hanya khusus pemerintah daerah saja yang mengetahuinya.
2. Prinsip Rule of Law
Untuk prinsip rule of law Pengelolaan keuangan daerah, Sudah berpedoman Semua sesuai dengan perundang-undangan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Prinsip Transparansi
Untuk prinsip transparansi belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah , karena pemerintah daerah Pemerintah daerah khususnya BPKAD Bengkulu Selatan tidak menyampaikan laporan keuangan daerah pada masyarakat.
4. Prinsip Akuntabilitas
Untuk prinsip Akuntabilitas belum sepenuhnya diterapkan dikarenakan, Pemerintah daerah merasa bahwa laproran pertanggungjawaban tidak perlu

disampaikan kepada masyarakat. dan Pemerintah juga belum memenuhi kewajiban untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

5. Prinsip Efektif dan Efisien

Untuk prinsip efektif dan efisien sudah diterapkan karena. baik dalam mengoptimalkan aset daerah yang dimiliki, baik aset yang akan dibutuhkan dimasa sekarang atau mendatang dengan efisien dan juga Badan pengelolaan keuangan aset daerah menggunakan SIMDA pada saat melakukan perekapan laporan keuangannya lebih cepat dan efisien.

6. Prinsip Responsibility

Untuk prinsip responsibility sudah diterapkan pada Badan pengelolaan keuangan aset daerah Dalam menyampaikan laporan realisasi dan pertanggungjawaban kepada BPK mereka mereview terdahulu untuk memastikan bahwa laporan keuangan ini secara seluruh sudah disusun dengan baik dan benar , berarti adanya respons yang baik dari BPKAD sebelum laporan tersebut disampaikan kepada BPK wilayah Bengkulu

7. Prinsip Keadilan

Untuk prinsip Keadilan sudah diterapkan Dalam penyusunan APBD , disusun melalui yang namanya musyawarah , musyawarah atau rapat ini yang akan dihadiri yaitu oleh PPTK , Staff dan Kabid dan juga ada TUPOKSI nya masing-masing.

8. Prinsip Peduli Kepada Masyarakat

Untuk prinsip peduli kepada masyarakat sudah diterapkan Badan pengelolaan keuangan aset daerah sudah menerapkan yaitu Pelayanan Prima dan masyarakat Masyarakat mendapatkan pelayanan public dengan baik.

9. Prinsip Berorintasi Kepada Konsensus

Untuk Prinsip berorintasi kepada konsensus belum sepenuhnya diterapkan oleh Badan pengelolaan keuangan aset daerah diarenakan keputusan-keputusan yang diambil pemerintah tidak adanya campur tangan dari masyarakat karena menyangkut informasi laporan keuangan daerah dan Ini dirahasiakan.